KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Taufik Tinggalkan Prabowo Sandi
Tanggal : Senin, 05 November 2018
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 12

Taufik 'Tinggalkan' Prabowo-Sandi

JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan mundur sebagai anggota Badan Pemenangan Nasional pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Sandiaga S. Uno.

John A. Oktaveri & Samdysara Saragih
redaksi@bisnis.com

Taufik Kurniawan menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016 yang dialokasikan untuk Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Wakil Ketua DPR bidang Ekonomi dan Keuangan itu resmi menjadi tahanan KPK pada Jumat (2/11). Dalam kasus itu, komisi antirasuah menduga pria kelahiran Semarang itu menerima aliran uang tak kurang dari Rp3 miliar dalam pembahasan DAK itu.

Keputusan mundurnya Taufik Kurniawan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal PAN Eddy Suparno.

Menurut Eddy, pernyataan Taufik mundur dari tim pemenangan memang baru disampaikan secara lisan.

"Taufik sudah menyampaikan secara lisan dan kami menerima apa yang disampaikan tersebut," kata Eddy usai menghadiri deklarasi Komando Ulama untuk Pemenangan Prabowo-Sandi (Koppasandi), Minggu (4/11).

Dengan mundurnya Taufik, dia berharap konsolidasi di BPN Prabowo-Sandi untuk memenangkan pasangan itu pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 tidak terganggu.

Eddy memaklumi sikap Taufik karena yang bersangkutan ingin fokus dalam menyelesaikan kasus hukumnya. "Beliau sudah ingin fokus menangani kasus hukumnya sehingga beliau sudah mundur dari BPN Prabowo-Sandi," jelasnya.

▸ Posisi Wakil Ketua DPR yang diemban oleh Taufik Kurniawan tengah dipertimbangkan untuk diisi oleh tokoh lain.

Adapun untuk posisi sebagai Wakil Ketua DPR, Eddy menyebut partainya sudah mempertimbangkan secara matang untuk melakukan reposisi.

Soal pengganti sebagai Wakil Ketua DPR, dirinya belum mau berspekulasi karena menunggu hasil rapat pimpinan PAN.

Satu nama kader yang mulai disebut untuk menggantikan Taufik yakni Hanafi Rais—putera tokoh pendiri PAN Amien Rais.

Taufik Kurniawan resmi ditahan KPK untuk 20 hari ke depan pada Jumat lalu. Keputusan KPK menahan Taufik karena memiliki bukti yang cukup kuat terkait dengan aliran dana yang diterima dirinya dari pejabat di Kabupaten Kebumen.

"Kami memutuskan untuk dilakukan penahanan karena memang penyidik sudah meyakini ada bukti yang cukup kuat sesuai dengan aturan KUHAP, " ujar Juru bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (2/11).

Taufik Kurniawan, lanjutnya, diduga keras melakukan tindak pidana korupsi dan memenuhi alasan subjektif dan objektif.

KPK telah memanggil Taufik Kurniawan sebanyak dua kali, yakni pada 25 Oktober 2018 dan 1 November 2018. Pihak Taufik kemudian meminta penjadwalan ulang pada 8 November 2018.

"Tapi tadi datang ke KPK dan memenuhi proses pemeriksaan. Saya kira itu cukup baik sehingga kami melakukan proses hukum ini lebih efektif," ucap Febri.

KPK berharap tersangka Taufik Kurniawan dapat bersikap kooperatif dalam kelanjutan proses hukum yang berlangsung.

Peran Taufik Kurniawan dalam kasus pembahasan DAK fisik tahun anggaran 2016 dirinci melalui pedekatan atau pertemuan yang dilakukan dengan Mohammad Yahya Fuad yang saat itu baru saja dilantik sebagai Bupati Kebumen periode 2016—2021.

Saat ditetapkan sebagai tersangka, Taufik diduga menerima *fee* sebesar 5% dari alokasi DAK yang mengucur ke Kabupaten Kebumen. Dalam APBN Perubahan 2016, Kabupaten Kebumen mendapat DAK fisik sebesar Rp93,37 miliar.

DUKUNGAN ULAMA

Dalam kesempatan terpisah, Capres Prabowo Subianto menyatakan mobilisasi dukungan ulama untuk pemenangan Pemilu Presiden 2019 didasarkan komposisi umat Islam sebagai segmen terbesar bangsa Indonesia.

"Apakah Prabowo sudah bergerak ke kanan, galang dukungan ulama dan sebagainya? Bangsa Indonesia mayoritas Islam, tapi tak berarti ancam [anak] bangsa lain," katanya dalam deklarasi Komando Ulama untuk Pemenangan Prabowo-Sandi (Koppasandi) di Jakarta.

Prabowo menjamin kelompok Islam pendukung telah memintanya untuk melindungi semua suku dan agama di Tanah Air. Komitmen itu termaktub dalam kontrak politik Ijtima Ulama II Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama beberapa waktu lalu.

Menindaklanjuti Ijtima Ulama II, sejumlah tokoh GNPF lantas mengkonsolidasikan dukungan terhadap kontestan Pilpres 2019 nomor urut 02 dalam wadah Koppasandi. Organisasi tersebut bakal bersinergi dengan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.

Komandan Jenderal Koppasandi Abdul Rasyid Abdullah Syafi'ie mengatakan organisasinya akan mengajak umat Islam dan eksponen Aksi Bela Islam 212 untuk menjadikan rumah mereka sebagai posko pemenangan Prabowo-Sandi. Menurut Abdul, materi kampanye bakal diarahkan pada tema-tema ekonomi dan hukum.

Visi dan misi di bidang ekonomi dan penegakan hukum kembali diungkit Prabowo dalam forum tersebut. Dia menilai ekonomi Indonesia saat ini dikuasai segelintir kalangan sehingga tidak mampu terdistribusi ke lapisan luas masyarakat.

Prabowo mengaku ikut kontestasi Pilpres 2019 untuk memperbaiki keadaan, bukan dalam rangka mengejar kekuasaan. Dia juga berjanji tidak mencari materi bila mendapatkan mandat kekuasaan. *(Rahmad Fauzan)*

Bisnis/Ilham Nesabana